

PEMETAAN *STAKEHOLDER* DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PULAU PASARAN KELURAHAN KOTA KARANG, KOTA BANDAR LAMPUNG

STAKEHOLDER MAPPING IN IMPROVING THE WELFARE OF FISHING COMMUNITIES ON PASARAN ISLAND, KOTA KARANG VILLAGE, BANDAR LAMPUNG CITY

Niken Puspita Dewi¹, Erna Rochana^{1,2}, Abdullah Aman Damai^{1,3}, Hartoyo^{1,2}, Maya Riantini^{1,7}, Indra Gumay Febryano^{1,4,5}, Novita Tresiana^{1,6}

¹Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana, Universitas Lampung

²Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

³Jurusan Kelautan dan Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

⁴Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

⁵Magister Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

⁶Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

⁷Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

Email: indra.gumay@fp.unila.ac.id

ABSTRAK

Stakeholder yang terlibat dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga masyarakat nelayan memiliki peran sangat penting dan saling bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berperan sebagai *players* adalah Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Perikanan Kota Bandar Lampung, karena *stakeholders* tersebut memiliki kepentingan sekaligus pengaruh yang sangat kuat. *Stakeholder* yang berperan sebagai *context setter* yaitu Kementerian Kelautan Perikanan Anggota Legislatif, tokoh masyarakat, LSM, Penyedia barang dan Jasa, Kepolisian dan TNI, Perguruan Tinggi, karena *stakeholders* tersebut memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan yang rendah. Peran *stakeholder* dengan kategori *subject* adalah nelayan kecil yaitu nelayan buruh dan buruh pengolah ikan, nelayan besar dan tengkulak. Nelayan merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi tidak memiliki pengaruh yang kuat. *Stakeholder* yang berkategori *crowd* adalah Camat Teluk Betung Timur, Lurah Kota Karang, perangkat Lingkungan dan RT di kelurahan Kota Karang, karena *stakeholder*, agar harapan dari pemerintah terhadap pemberian program tersebut dapat terealisasi dan kesejahteraan masyarakat nelayan semakin meningkat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil dan informasi pendukung dalam penggunaan alat tangkap yang lebih berkembang dengan melakukan pelatihan *entrepreneur*, pengembangan keterampilan dan keahlian untuk para nelayan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung.

Kata kunci : nelayan, pemetaan *stakeholder*, kesejahteraan, *stakeholder*

ABSTRACT

Stakeholders involved in improving the welfare of fishing community households have a very important role and synergize with each other in policy implementation. The purpose of this study was to map the stakeholders involved in efforts to improve the welfare of fishing communities on Pasaran Island, Kota Karang Village, Bandar Lampung City. Data collection was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews and documentation studies. The data analysis method was carried out descriptively to map the stakeholders involved based on their interests and influence. The results showed that the players

were the Lampung Provincial Government, Bandar Lampung City Government, Bandar Lampung City Fisheries Service, because these stakeholders have a very strong interest and influence. Stakeholders who act as context setters are the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Legislative Members, community leaders, NGOs, Goods and Services Providers, Police and TNI, Universities, because these stakeholders have great influence but low importance. The role of stakeholders with the subject category is small fishermen, namely labor fishermen and fish processing laborers, large fishermen and middlemen. Fishermen are stakeholders who have a high interest, but do not have a strong influence. Stakeholders in the crowd category are the Head of East Teluk Betung Sub-District, Head of Kota Karang Village, Neighborhood and RT officials in Kota Karang Village, because stakeholders, so that the expectations of the government for the provision of the program can be realized and the welfare of the fishing community will increase. In addition, community empowerment can also be carried out through developing the capacities of small fishermen and supporting information in the use of more developed fishing gear by conducting entrepreneurial training, developing skills and expertise for fishermen on Pasaran Island, Kota Karang Urban Village, Bandar Lampung City.

Keywords: fisherman, stakeholder mapping, welfare, stakeholders

PENDAHULUAN

Nelayan merupakan sebagian orang atau komunitas yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Disini nelayan yang dimaksud merupakan anggota nelayan yang hanya memiliki kapal kecil, sedangkan kelompok nelayan adalah beberapa orang nelayan yang menghimpun diri dalam suatu kelompok saling bekerja sama secara teratur karena memiliki keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), keakraban, kepentingan bersama, dan saling percaya, serta mempunyai tujuan bersama (Dahuri, 2009). Dalam rangka memperbaiki taraf hidup nelayan dan meningkatkan produksi perikanan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti modal kerja, teknologi penangkapan ikan yang digunakan, serta jam kerja nelayan saat melaut mencari ikan (Dahuri, 2009). Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melalui Undang-undang No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, yang dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan dalam upaya membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan usaha di bidang perikanan, serta upaya peningkatan kemampuan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.

Masyarakat nelayan yang kehidupannya berada di pesisir laut dengan potensi sumberdaya hasil perikanan yang melimpah akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat nelayan yang dianggap sebagai masyarakat dengan golongan miskin jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya (Puspitasari, 2015). Posisi tingkat sosial masyarakat inilah yang cenderung menempatkan nelayan berada dalam

lingkaran garis kemiskinan, baik secara struktural maupun kultural yang mengantarkannya menjadi komunitas masyarakat terpinggirkan dalam proses pembangunan masa lalu.

Pulau Pasaran memiliki potensi sumberdaya alam yang besar akan tetapi sebagian besar masyarakat di Pulau Pasaran bekerja sebagai nelayan buruh dan buruh pengolah ikan yang memiliki latar belakang kehidupan yang ditandai dengan kemiskinan. Kontribusi buruh yang besar ternyata tidak mendapat apresiasi. Dari tahun ke tahun selalu muncul permasalahan buruh terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan yang merupakan masalah yang paling sensitif. Permasalahan klasik yang muncul adalah keinginan buruh untuk menaikkan upah mereka. Hal ini dikarenakan upah yang mereka terima dirasa tidak sebanding atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup riil sehari-hari (Eldy et al., 2014).

Kesejahteraan pekerja dapat terpenuhi apabila pekerja mendapatkan penghasilan yang layak, dan adanya jaminan sosial, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya, dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu sistem pengupahan harus dapat mencerminkan keadilan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi jasa mereka dan mendorong peningkatan kesejahteraan dan keluarganya (Rachman, 2017).

Sumber daya yang melimpah serta alat tangkap yang sudah berkembang ternyata masih membuat kondisi kehidupan masyarakat nelayan di Pulau Pasaran dianggap tingkat kesejahteraannya masih rendah (Yasir, 2017). Sudah cukup banyak usaha serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan

kesejahteraan nelayan. Hingga saat ini upaya tersebut masih dilakukan dan belum juga terselesaikan. Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu yang diidentifikasi dalam lingkup proses terjadinya kebijakan (Kartodihardjo, 2017). Analisis dan implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses pembuatan kebijakan (Dunn, 1991). Perlu adanya upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan

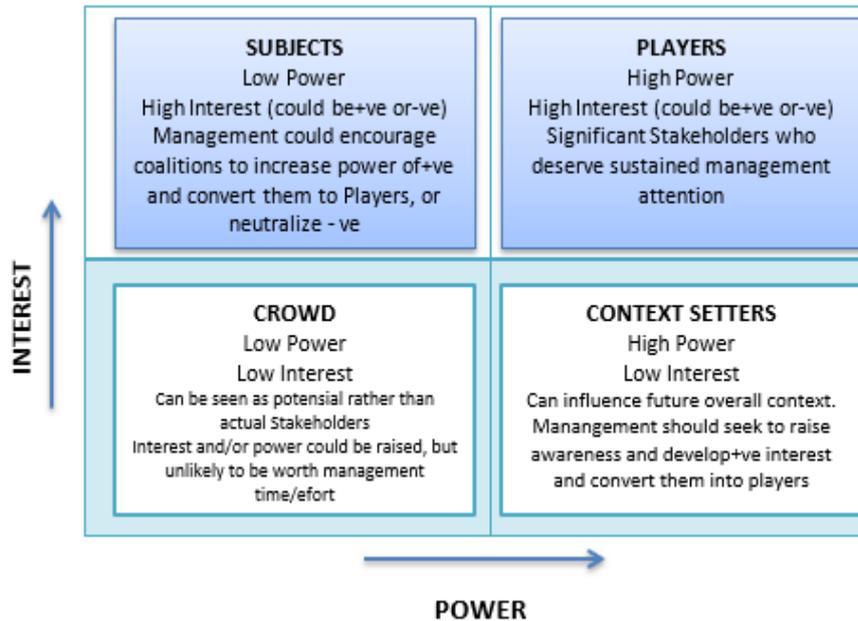
stakeholder yang terlibat terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga masyarakat nelayan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kota Bandarlampung. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Lurah Kelurahan Kota Karang, Rukun Tetangga (RT) 11 dan 12 LK.II, Ketua Kelompok Nelayan, Pengolah ikan asin, nelayan buruh dan buruh Pengolah ikan.



Gambar 1. Peta Wilayah Pulau Pasaran (sumber : Google Map dan RTRW BDL 2021)



Gambar 2. Kuadran Power vs Interest Grid
 Sumber: Ackermann & Eden (2010)

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memetakan stakeholder yang terlibat berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Tahapan-tahapan yang digunakan berdasarkan Eden dan Ackermann (1998) untuk memetakan stakeholder sebagai berikut: 1. Policy implementation Mapping; 2. Power Versus Interest Grid (player, context setters, subject, dan crowd); 3. Membuat rekomendasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.258/23/HK/2010 tentang penetapan lokasi Kawasan Minapolitan Kota Bandar Lampung yang meliputi Pulau Pasaran dan Lempasing, serta ditetapkan juga didalam RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 sebagai kawasan minapolitan yang staretgis dalam penggerak ekonomi wilayah dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Pulau Pasaran secara administrasi bagian dari Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan salah satu pulau yang ada di Kota Bandar Lampung. Pulau Pasaran terkenal sebagai sentra pengolahan ikan teri terbesar di Kota Bandar Lampung dengan skala usaha industri dari kecil hingga menengah atau UMKM (Delia, 2017).

Hampir sebagian besar penduduk yang tinggal di Pulau Pasaran menggantungkan perekonomiannya disektor perikanan (Delia, 2017). Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh nelayan, buruh pengolah ikan

dan pemilik usaha pengolah ikan asin. Berdasarkan Salsabila (2022), ada 224 KK dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan buruh dan buruh pengolah ikan yang berada di Pulau Pasaran sebanyak 396 orang.

Keseluruhan total masyarakat nelayan termasuk golongan produktif penuh yang bekerja sebagai nelayan buruh dan buruh pengolah ikan dengan tingkat pendapatan yang ada masih tergolong rendah. Dari total 82 responden yang ada 70 responden atau 85,36% diantaranya masih berpendapatan rendah.

Potensi Sumber daya alam yang berlimpah serta sumber daya manusia dan alat tangkap yang mendukung tetapi tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat nelayan tersebut masih tergolong rendah. Kebijakan pemerintah menetapkan Pulau Pasaran sebagai sentra disektor perikanan tangkap, pengolahan ikan kering, selain itu daya dukung air, sarana prasarana dan transportasi mendukung untuk kegiatan yang ada di sentra tersebut (Susanti, 2017).

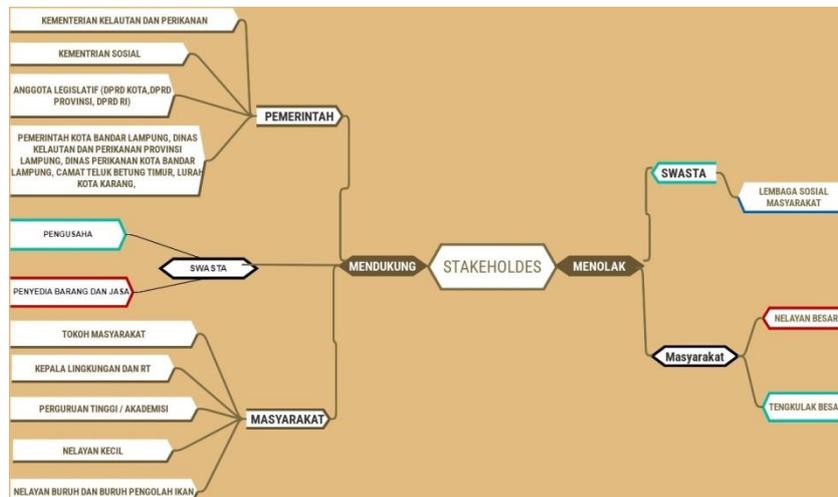
PEMETAAN STAKEHOLDER

Pada pemetaan yang telah dilakukan terkait stakeholder yang terlibat dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga masyarakat nelayan di Pulau Pasaran yang berjumlah 9 stakeholder yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing (Tabel1). Stakeholder tersebut dibagi menjadi dua

kelompok yang mendukung dan menolak terhadap kebijakan pemerintah terhadap program yang diberikan kepada nelayan buruh dan buruh pengolah ikan yang memiliki kartu KUSUKA berupa bantuan Uang Tunai untuk nelayan kecil di Pulau Pasaran. Kebijakan tersebut berasal dari beberapa *stakeholder* yang membuat keputusan kebijakan.

Stakeholder yang berada pada posisi *player* yaitu Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Perikanan Kota Bandar Lampung. *Stakeholder* tersebut menjadi *player*, karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. *Stakeholder* dengan kategori *player* tersebut merupakan pengawas sekaligus penyelenggara perumusan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh *stakeholder* lain akan dijalankan

melalui koordinasi dengan semua pihak terkait dan saling bersinergi satu sama lain dalam pelaksanaan kebijakan program oleh *stakeholder* ini. Hal ini didukung oleh Widodo et al. (2018) *stakeholder* yang berada pada kategori *player* merupakan kelompok yang paling kritis karena memiliki nilai penting dan pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan program peningkatan kesejahteraan. Sejalan dengan pernyataan Sembiring et al. (2010) bahwa pengelola yang mendapat kekuasaan secara legal selalu menempati posisi sebagai pemangku kepentingan utama. *Stakeholder* dengan kategori *context setter* yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Sosial (KEMENSOS) dan Anggota Legislatif. Kedua *stakeholder* tersebut masuk dalam kategori *context setter* karena memiliki pengaruh yang tinggi dengan kepentingan yang rendah.



Gambar 2. Pemetaan *Stakeholder* peningkatan Kesejahteraan masyarakat nelayan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung



Gambar 3. Kuadran Power vs Interest Grid *Stakeholder* peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung

Tabel 1. Penduduk Pulau Pasaran Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan jenis pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
Pegawai Negeri Sipil	1
Karyawan	70
Pedagang	120
Tukang	7
Penjual jasa /buruh	452
Nelayan	42
Ibu rumah tangga	247
Lain	300

Menurut Hartati et al. (2014) sebagian *stakeholder context setter* memiliki kewenangan atas kebijakan yang dibuat dan memiliki kewenangan pengawasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan terlibat karena Pulau Pasaran merupakan kawasan minapolitan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena sebagian besar masyarakat di Pulau Pasaran berprofesi sebagai nelayan pencari ikan dan pengolah sumber daya hasil perikanan, melalui Keputusan Menteri No. 32 Tahun 2010, Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.258/23/HK/2010 tentang penetapan lokasi Kawasan Minapolitan Kota Bandar Lampung yang meliputi Pulau Pasaran dan Lempasing tahun 2011-2030.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perannya sebagai penyedia dan pembuat peraturan kebijakan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Pasal 7(1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 dan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Keputusan Menteri Kelautan Perikanan (Kepmen KP) No. 19 tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri No. 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.24

Menurut Widodo et al. (2018) *stakeholder* kategori ini memiliki wewenang yang besar untuk membuat suatu kebijakan terkait memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan daerahnya.

Kegiatan pemberian bantuan kepada nelayan kecil (nelayan buruh dan buruh pengolah ikan) yang memiliki kartu KUSUKA berupa bantuan uang tunai memiliki tujuan agar dapat membantu nelayan menstimulasi perekonomian para nelayan dan harapannya dapat meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan nelayan kecil (nelayan buruh dan buruh pengolah ikan) dapat lebih baik, sehingga sesuai dengan tujuan dari *stakeholder* dalam membuat suatu kebijakan. Hal tersebut didukung oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) 2015 berupa upaya dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing masyarakat pesisir, khususnya nelayan sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilakukan bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Pihak swasta dalam hal ini sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa berperan dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil (nelayan buruh dan buruh pengolah ikan) berupa bantuan uang tunai. Kegiatan dan penyediaan sarana tersebut merupakan program perusahaan (CSR). Pihak Kepolisian berperan dalam mengawasi kegiatan pelaksanaan pemberian program dari pemerintah terkait. *Stakeholder* terakhir sebagai *context setter* yaitu perguruan tinggi yang berperan sebagai konsultan terkait manfaat dan permasalahan dari program yang diberikan dari sudut pandang ilmu.

Kategori *stakeholder subject* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh, *stakeholder* tersebut nelayan kecil yaitu nelayan buruh dan buruh pengolah ikan, nelayan besar dan tengkulak. Nelayan merupakan masyarakat yang memiliki kepentingan besar dalam program bantuan yang diberikan oleh pemerintah terkait dimana mereka yang merasakan manfaat dari program tersebut. Sejalan dengan pernyataan Risien dan Tilt (2008) bahwa masyarakat nelayan memiliki ketergantungan dan kepentingan yang lebih besar dalam penggunaan sumberdaya alam di sekitar mereka dan nelayan juga ikut serta dalam menentukan keberhasilan program yang diberikan oleh pemerintah (Salampessy et al.,

2021). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga *stakeholders* tersebut perlu terlibat dan berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Widodo et al. (2018) melibatkan tersebut bisa dilakukan dengan cara pemberdayaan dan mengikutsertakan di setiap tahapan penyaluran bantuan.

Stakeholder berkategori *crowd* yaitu Camat Teluk Betung Timur, Lurah Kota Karang, perangkat Lingkungan dan RT di kelurahan Kota Karang. *Stakeholder* tersebut masuk dalam kategori *crowd* karena *stakeholder* ini tidak memiliki pengaruh dan kepentingan yang kuat. Dalam peranannya, *Stakeholder* ini hanya melakukan pendataan jumlah masyarakat nelayan yang berprofesi sebagai nelayan buruh dan buruh pengolah ikan yang berhak menerima bantuan sebagai bentuk kerjasama dan birokrasi yang dilakukan pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, selain itu juga para *stakeholder* ini melakukan pembinaan kepada masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil baik nelayan buruh dan buruh pengolah ikan untuk dapat menggunakan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan usaha dan menekan biaya pengeluaran. Menurut Widodo et al. (2018) *crowd* merupakan *stakeholder* dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah. *Stakeholder* ini membutuhkan sedikit pengawasan dan evaluasi namun dengan prioritas yang rendah.

Stakeholder yang saling berperan dan berpartisipasi aktif, mulai dari tahap pembuatan kebijakan, penentuan program yang akan di berikan, tahap pelaksanaan program dan penyaluran bantuan, dan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi di lakukan oleh *stakeholder* terkait dengan harapan kepada nelayan buruh dan buruh pengolah ikan penerima program untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di pulau pasaran kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung.

Upaya dari peningkatan kesejahteraan nelayan bagan tersebut pasti terdapat kendala dan permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berasal dari masyarakat yang masih kurang memahami pemanfaatan dari bantuan yang diberikan, dan masyarakat nelayan yang cenderung menjadi kebiasaan dan hanya mengandalkan bantuan tanpa berfikir untuk melakukan hal lain guna menambah penghasilan dari pekerjaan sampingan yang lain. Kolaborasi *stakeholder* dalam masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan dengan tidak adanya kolaborasi lintas sektoral. Menurut Winardi (2019) apabila

kolaborasi atau kerjasama antar stakeholder berjalan dengan efektif dapat meningkatkan percepatan perumusan suatu kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang sudah ada. Tresiana et al. (2022); Febryano et al. (2015) juga mengatakan bahwa strategi pengelolaan akan terwujud dari adanya partisipasi dan kolaborasi semua *stakeholder*

KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Perikanan Kota Bandar Lampung merupakan *stakeholder* yang berperan sebagai *players* karena *stakeholders* tersebut memiliki kepentingan sekaligus pengaruh yang sangat kuat. *Stakeholder* yang berperan sebagai *context setter* yaitu Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Sosial, anggota legislatif, tokoh masyarakat, penyedia barang dan jasa, Kepolisian dan TNI, Perguruan Tinggi, karena memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan yang rendah. Peran *stakeholder* dengan kategori *subject* dalah nelayan kecil (nelayan buruh dan buruh pengolah ikan), nelayan besar dan tengkulak nelayan, karena memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi tidak memiliki pengaruh yang kuat. *Stakeholder* yang berkategori *crowd* adalah Camat Teluk Betung Timur, Lurah Kota Karang, perangkat Lingkungan dan RT di kelurahan Kota Karang, karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Kejasama lintas sektoral harus dilakukan, agar harapan dari pemerintah terhadap pemberian program tersebut dapat terealisasi dan kesejahteraan rumah tangga masyarakat nelayan semakin meningkat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil dan informasi pendukung dalam penggunaan alat tangkap yang lebih berkembang dengan melakukan pelatihan *entrepreneur*, pengembangan keterampilan dan keahlian untuk nelayan bagan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung.

REFERENSI

- Aji, I.N., Wibowo, B.A. & Asriyanto. 2013. Analisis faktor produksi hasil tangkapan alat tangkap cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technologi*, 2(4):50- 58
- Dahuri. R. 2009. Pengembangan Rencana Pengelolaan Pemanfaatan Berganda

- Ekosistem Mangrove di Sumatra. Bogor: Fakultas Perikanan IPB dan Ketua Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan PPLH Lembaga Penelitian IPB.
- Dunn, W.N. 1991. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eden, C. & Ackermann, F., 1998. Making Strategy: The Journey of Strategic Management. Sage. London
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C. & Hidayat, A. 2015. Actor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12:125-142.
- Febryano, I.G., Sinurat, J. & Salampessy, M.L. 2017. Social relation between businessman and community in management of intensive pond. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 55(1): p.012042 DOI: 10.1088/1755-1315/55/1/012042
- Hardian, D., Febryano, I.G., Supono., Damai, A.A. & Winarno. G.D. 2022. Pemetaan Stakeholder Dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Taman pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Analisis Kebijakan Wilayah Pesisir dan Laut*, 5: 155-156
- Ikramullah, M., Miswar, E., & Mutia, A., 2018. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Tangkapan Bagan Apung di Perairan Krueng Raya, Aceh Besar, Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah*, 3(3):136-144.
- Kartodihardjo, H. 2017. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Bogor: Firdaus Pressindo.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. <https://news.kkp.go.id/index.php/meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-pesisi>. Jakarta
- Nordiansyah, H., Ismail & Bakrie, L. 2016. Penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di Kawasan Cagar Alam Padang Luway Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal AGRIFORi*, 15:43-54.
- Risien, J.M. & Tilt, B., 2008. A comparative study of community based sea turtle management in Palau: key factors for successful implementation. *Conservation and Society*, 6:225-237.
- Rochmah, S.F., Febryano, I.G., Kaskoyo, H., Widiastuti, E.L. & Safe'i, R. 2022. tourist's perception of the existence of coastal vegetation as a support of turtle habitat in Pangumbahan Coastal Park, Pangumbahan Village, Sukabumi Regency, West Java Province, Indonesia. *International Science and Art Research Center, International Hasankeyf Scientific Studies and Innovation Congres*
- Salampessy, M.L., Febryano, I.G., & Ichsan, A.C. 2021. Community knowledge and involvement in mangrove ecosystem management in the coastal of Muara Gembong Bekasi. *The 13th International Symposium of Indonesia Wood Research Society. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 891(1): p.012024.
- Salampessy, M.L., Febryano, I.G., Martin, E., Siahaya, M.E. & Papilaya, R. 2015. Cultural capital of the communities in the mangrove conservation in the coastal areas of Ambon Dalam Bay, Moluccas, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences* 23. International Conference on Tropical and Coastal Region Eco-Development 2014
- Salsabila, V.A, 2022. Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan Rumah tangga pengolah ikan teri asin di pulau pasaran Kota bandar lampung. *Jurnal Skripsi Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Lampung.*
- Sembiring, E., Basuni, S. & Soekmadi, R. 2010. Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 16:84-91
- Tresiana, N., Duadji, N., Febryano, I.G. & Zenitha, S.A. 2022. Saving mangrove forest extinction in Urban Areas: Will government interventions help?. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17:375-384
- Widodo, M.L., Soekmadi, R. & Arifin, H.S. 2018. Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8:55-61.
- Yasir M., 2017. Keadaan Sosial Ekonomi Nelayan Bagan Di Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung. *Jurnal Skripsi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.*